BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Motif PDI Perjuangan menempatkan Tri Risma Harini sebagai kandidat yang direkrut dalam pemilihan walikota Surabaya tahun 2015.

Salah satu fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik atau pejabat pemerintah ialah rekrutmen politik. Pembelajaran tentang bagaimana partisipasi aktor politik sampai terakomodasi dalam suatu keanggotaan institusi politik. Rekrutmen politik dimaknai sebagai suatu proses pertahanan sistem yang dilembagakan dan sebagai sistem pemagangan.

Sistem rekrutmen politik dipengaruhi oleh tradisi partai dan lingkungan sistem politiknya. Sebab itu setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Sementara itu perekrutan anggota partai politik disesuaikan dengan sistem yang dianut. Perekrutan politik berlangsung melalui pemilihan umum setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi partai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses rekrutmen politik pada dasarnya dilakukan melalui prosedur pemilihan umum, ujian, training formal, serta sistem giliran. Dalam proses ini terdapat klasifikasi prosedur rekrutmen elit politik ke dalam 2 bentuk. Pertama prosedur tertutup, suatu proses rekrutmen yang ditentukan oleh elit partai, siapa saja yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif dan eksekutif.

Kedua, prosedur terbuka, nama-nama calon yang diajukan diumumkan secara terbuka dalam bentuk kompetisi murni. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah: Mekanismenya demokratis. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.[64]

Pada pemilihan walikota Surabaya tahun 2015, di mana PDI Perjuangan yang merupakan partai pengusung Tri Risma Harini untuk menjadi calon kepala daerah. Prosedur perekrutan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini dilakukan secara terbuka. Pendaftar calon kepala daerah bisa melalui internal ataupun eksternal untuk dilakukan proses penjaringan. Kriteria antara kader partai dan non kader partai tidak

[64]Putra Fadilah, *Partai Politik Dan Kebijakan Politik* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi klasifikasi yang sangat dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan peryataan Djoko Prasektyo:

> *"Cara perekrutannya partai membuka secara resmi calon kepala daerah baik dari internal atau eksternal itu di buka secara resmi untuk penjaringan. Jadi kalau Bupati atau Walikota berarti pintu masuk wewenang DPC atau pengurus tingkat cabang. Tetapi kalau Gubernur pintu masuk DPD. Jadi kader maupun non bisa mendaftar."*[65]

Djoko juga mejelaskan setelah proses penjaringan akan ada *fit and proper* terhadap calon kepala daerah. Namun ada perbedaan antara PDI Perjuangan dengan partai politik lainnya. Sebab di ketua umum PDI Perjuangan memiliki hak veto untuk memutuskan nama calon kepala daerah. Baik calon kepala daerah tersebut mendaftar atau tidak. Apabila rekrutmen yang dilakukan oleh struktur partai ketua umum tidak berkenan maka ketua umum punya kewenangan untuk menunjuk calon kepala daerah.

Proses pemilihan calon kepala daerah Surabaya oleh PDI Perjuangan tahun 2015 juga diputuskan oleh pusat. Pada saat itu nama yang mendaftar ialah Wisnu Shakti Buana, namun setelah SK DPP, PDI Perjuangan menetapkan nama Risma sebagai calon kepala daerah dan Wisnu sebagai wakil kepala daerah.

Perekrutan Risma oleh PDI Perjuangan ini juga bisa dilihat dari kacamata teori fenomenologi. Di mana realitas yang tampak bahwa PDI Perjuangan tidak berpikir lebih lama lagi untuk kembali merekrut Risma. Interpretasi PDI Perjuangan apabila meilhat pengalaman periode

[65] Djoko Prasektyo, *Wawancara*, Surabaya 11 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya yaitu 2010 atas perekrutan Risma. Fenomenologi di sini tidak dapat berdiri sendiri karena memiliki penafsiran yang lebih lanjut.

Tindakan subjektif para aktor dalam hal ini ialah Risma, tidaklah muncul begitu saja. Perekrutan Risma oleh PDI Perjuangan melalui evaluasi yang panjang. Pertimbangan dalam perekrutan Risma juga mempertimbangkan kondisi sosial di mana masyarakat Surabaya lebih pro kepada Risma dari pada Wisnu. Selanjutnya kemampuan dari diri Risma yang memiliki elektabilitas dan popularitas, serta prestasi yang juga dimilikinya.

Fenomenologi (motif) memiliki dua pemaknaan yaitu motif *because, kedua*, motif *in order to*. Adapun PDI Perjuangan sebagai partai besar tentu mempunyai beberapa motif sehingga mengusung nama Risma untuk maju sebagai calon kepala daerah. Dalam penelitian ini klasifikasi motif meliputi *because of* yang terdiri dari elektabilitas dan popularitas, prestasi dan problem rekrutmen partai politik. Sedangkan motif *in order to* meliputi peluang kemenangan. Di antara motif tersebut adalah:

1. *Because of* Motif

Motif *because of* merupakan motif yang melihat ke belakang. Secara sederhana bisa dikatakan pengidentifikasian masa lalu sekaligus menganalisisnya, sampai seberapa memberikan kontribusi dalam tindakan selanjutnya. Sebelum tahun 2015, Risma lebih dulu diusung PDI Perjuangan pada tahun 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Periode sebelumnya yaitu tahun 2010 elektabilitas Risma menjadi salah satu alasan kepemimpinannya dikenal oleh masyarakat Surabaya. Identifikasi di masa lalu juga menjadi pertimbangan dalam pengusungan Risma. Elektabilitas yang baik tentu memiliki kesempatan yang luas untuk menjadi pemenang. PDI Perjuangan percaya akan elektabilitas yang dimiliki Risma. Selain itu kontribusi dalam tindakan Risma untuk keberlangsungan PDI Perjuangan juga diyakini oleh partai tersebut. Adapun motif *because of* dari penelitian ini meliputi:

a. Elektabilitas dan Popularitas

PDI Perjuangan memiliki pengaruh sebagai partai pemenang tidak hanya berlaku di wilayah pusat dalam artian Indonesia. Di wilayah lainnya termasuk Surabaya, perolehan suara PDI Perjuangan bahkan selalu menempati posisi dan masuk sebagai partai dengan perolehan suara banyak. Hal tersebut serupa dengan pernyataan Sukadar yaitu sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya Fraksi PDI Perjuangan:

> *"Kalau Surabaya PDI Perjuangan memang mendominasi. Bukan hal baru ya kalau di Surabaya, siapapun yang diusung PDI Perjuangan pasti menang."*[66]

Pada pemilihan walikota 2015 di Surabaya, munculnya Tri Risma Harini sebagai calon kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan tentu memiliki proses. Sebagai partai besar, PDI

[66] Sukadar, *Wawancara,* Surabaya, 9 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjuangan tentu memiliki alasan yang kuat dan bisa dipertimbangkan. Apalagi jika dilihat latar belakang Tri Risma Harini yang notabenenya non kader PDI Perjuangan Kota Surabaya.

Setiap partai politik, termasuk PDI Perjuangan tentu memiliki *platform* partai yang berbeda. Ideologi PDI Pejuangan yaitu kebangsaan dan kerakyatan, hal tersebut yang menjadi pijakan berfikir bagi seluruh kader PDI Perjuangan baik pada saat proses pencalegan atau kepala daerah.

Nama Tri Risma Harini sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat luas terutama di wilayah Surabaya. PDI Perjuangan pertama kali mengenal Risma salah satunya karena reformasi birokrasi. Elektabilitas yang dimiliki Risma membuat PDI Perjuangan bisa menjadi partai pemenang. Calon kandidat yang memiliki elektabilitas dan popularitas lebih dikenal oleh masyarakat.

Pada dasarnya setiap partai politik memiliki tujuan yaitu untuk memperebutkan kekuasaan. Salah satunya mengusung non kader namun memiliki elektabilitas serta popularitas yang tinggi. Hal tersebut juga diutarakan oleh Wakabid Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"Betul. Paling tidak popularitas dulu, tapi juga perlu elektabilitas. Karena kalau popularitas saja tetapi sentiment negatif tentu tidak akan menjadi pilihan partai termasuk PDI Perjuangan."*[67]

Sukadar juga menjelaskan terkait elektabilitas yang dimiliki Risma. Bahwa elektabilitas dan popularitas digabungkan dengan fenomena di lapangan ini sesuai. Karena pengaruh elektabilitas calon kandidat memang berpengaruh pada proses kemenangan pemilihan umum tersebut. Selain elektabilitas dan popularitas yang menjadi pertimbangan adalah kandidat yang diusung sesuai dengan visi dan misi partai.

> *"Terkait dengan popularitas dan elektabilitasnya ini selalu di atas. Lalu nanti setelah digabungkan dengan mesin partai justru bisa bertambah ke atas. Jadi kandidat itu saja yang diusung, dan yang terjadi atau realita di lapangan seperti itu, bahwa partai politk itu memang tujuan utama untuk merebut kekuasaan. Tapi secara konstitusional kekuasaan ketika kita rebut ini sesuai dengan visi misi partai. Misal PDI Perjuangan, maka garis perjuangan PDI Perjuangan, bagaimana itu nanti diwujudkan dalam politik penganggaran."*[68]

b. Prestasi

Motif pengusungan Risma sebagai calon kandidat kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan ialah prestasi. Sebelumnya Risma dikenal masyarakat sebagai birokrat cemerlang. Pada saat itu Risma menjabat sebagai Kepala Bina Program di Kota Surabaya. Risma memiliki ide terkait proses perizinan dan lelang implementasi diubah menjadi sistem online. Contoh implementasi tersebut ialah lelang pemerintah yang sudah

[67] Djoko Prasektyo, *Wawancara*, Surabaya 11 April 2017.
[68] Sukadar, *Wawancara,* Surabaya, 9 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaki internet. Pada saat itu walikota Surabaya masih Bambang DH yang menjabat.

Kemudian prestasi yang dimiliki Risma dalam mengatasi masalah perkampungan dan kebersihan juga membuat Risma lebih dikenal masyarakat. Prestasi tersebut ditandai dengan munculnya program *Green and Clean*. Bahkan perusahaan melalui CSR juga ikut berpartisipasi. Prestasi yang dimiliki sudah dikenal masyarakat, selanjutnya upaya Risma tersebut juga sejalan dengan visi dan misi PDI Perjuangan.

> *".....Risma dari situ sudah mulai kelihatan untuk program Green and Clean tidak sedikit kita sudah bisa melibatkan partisipasi tidak hanya masyarakat tapi pihak perusahaan melalui CSR, jadi ada penghematan, program lancar, APBD tak berkurang serta hemat. Visi dan hal seperti itu sejalan dengan PDI Perjuangan, reformasi birokrasi dan pelayanan masyarakat semakin mudah merakyat dan progam yang digelar pemerintah kota tidak hanya bertumpu pada APBD. "*[69]

Nugroho juga menjelaskan bahwa prestasi juga menjadi motif PDI Perjuangan untuk mengusung Risma. Calon kepala daerah yang berprestasi akan berpengaruh kepada tingkat perolehan suara. Selain berprestasi, Risma juga sosok yang menjadi kepala daerah yang berhasil diperiode pertama yaitu tahun 2010.

> *".....karena yang berprestasi biasanya dicintai rakyatnya dengan begitu tingkat kepemilihannya menjadi besar. Sehingga mudah memenangkan pemilu, disamping fakta di lapangan yang menganggap bahwa Risma merupakan salah satu kepala daerah yang berhasil. Adapula alasannya bahwa Risma itu bersih*

[69] Djoko Prasektyo, *Wawancara*, Surabaya 11 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tidak memiliki persoalan hukum. Sehingga itu menjadi pilihan PDI Perjuangan karena prioritas prestasi.[70]

c. Problem Rekrutmen Partai Politik

Problem rekrutmen politik di sebagian besar partai politik di Indonesia pada umumnya terkait dua jenis rekrutmen, yakni rekrutmen kepengurusan, dan seleksi calon pejabat publik. Pada pemilihan calon kepala daerah kota Surabaya tahun 2015 oleh PDI Perjuangan juga demikian. Di mana anggota partai masih relatif belum terlibat dalam seleksi kandidat. Kondisi seperti ini disebabkan lemahnya kedudukan anggota partai dalam partai tersebut. Selanjutnya penguasaan partai oleh seorang tokoh besar dalam artian perekrutan bersifat terbuka dan demokratis.

Terlepas dari elektabilitas dan popularitas serta prestasi, kemunculan Risma pada pilwali Kota Surabaya tahun 2015 yang diusung oleh PDI Perjuangan pada saat itu disandingkan oleh Wisnu. Pada saat itu ada PAN, Gerindra serta terdapat pula koalisi majapahit. Bahkan ada juga Demokrat yang sudah mendaftar ke KPU namun, tiba-tiba saja beralasan ke kamar mandi lalu tidak kembali (kabur). Selanjutnya ada pendaftar lagi yang belum menyelesaikan tanda tangan berita acara terkait dengan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi. Fenomena tersebut jelas menunjukkan bahwa partai politik belum sepenuhnya, bahkan tidak

[70] SW Nugroho, *Wawancara,* Surabaya 19 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua partai politik sepenuhnya sudah mampu mengkader untuk dijadikan kandidat saat itu.

> *"Itu gagal, pertama saya bilang partai politik itu gagal untuk mengkader kadernya sendiri yang dipersiapkan sebagai calon legislatif. Kedua mungkin jenjang di partainya itu tidak ada kaderisasi. Hanya sebatas rekrutmen siapa yang punya uang ayo kamu saya rekrut tak masukkan partaiku dan saya jadikan kandidat dan segera maju."*[71]

Sukadar juga menjelaskan bahwa problem rekrutmen itu karena partai belum bisa menjadikan kadernya sendiri untuk mengikuti pemilihan calon kepala daerah. Kader sendiri dianggap belum mampu bersaing atau belum saatnya untuk dimarketingkan pada proses pemilihan umum. Sehingga untuk memperoleh kemenangan tersebut PDI Perjuangan mengusung non kader namun memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk menjadi pemenang.

PDI Perjuangan dalam hal ini mengalami problem rekrutmen dan kaderisasi sehingga tidak memiliki kepercayaan diri untuk memajukan kadernya sendiri sebagai kandidat dalam pemilihan walikota.

> *"Lalu tiba-tiba ini partai saya seharusnya sudah bisa menjadikan kaderku tetapi kalau ini yang diusung belum tentu menang. Jadi belum bertarung sudah merasa dirinya kalah. Akhirnya inisiatif supaya tidak memajukan kader sendiri. Sedangkan ada yang non kader tapi dia berpotensi untuk diusung karena elektabilitasnya."*[72]

---

[71] Sukadar, *Wawancara,* Surabaya, 9 Juni 2017.
[72] Sukadar, *Wawancara,* Surabaya, 9 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketidakpercayaan diri PDI Perjuangan terhadap kader sendiri juga menjadi alasan memilih Risma. Meskipun Risma non kader PDI Perjuangan namun berkat elektabilitas dan popularitas, serta prestasi yang dimiliknya membuat PDI Perjuangan berani mengusungnya.

2. *In Order to* Motif

Sedangkan motif *in order to* ini motif yang dijadikan pijakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertujuan mencapai hasil. Makna tindakan identik dengan motif untuk tindakan *(in order to motive)*; artinya,untuk memahami tindakan individu maka harus dilihat dari motif apa yang mendasari tindakan tersebut.

Perekrutan non kader PDI Perjuangan juga memiliki motif yang digunakan untuk tujuan mereka. Motif yang digunakan PDI Perjuangan bertujuan untuk perolehan suara agar menang. Eksistensi partai tersebut juga menjadi alasan yang merekrut Risma oleh PDI Perjuangan. Tindakan yang dilakukan oleh PDI Perjuang ini melibatkan atau mengikutsertakan beberapa motif. Adapun motif *in order to* meliputi:

a. Peluang Kemenangan

Non kader yang diusung oleh PDI Perjuangan pada calon kepala daerah Kota Surabaya tahun 2015 juga memiliki peluang kemenangan lebih besar. Bahkan dari pihak internal sendiri Risma

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sebagai sosok yang lugas, tegas dan tanpa kompromi. Hal tersebut serupa dengan pernyataan Sukadar.

> *"Jadi beda ketika kita punya walikota yang mudah dikendalikan oleh orang lain maka nggak akan jadi kota tersebut, tidak bisa menjaga kota itu karena pikirannya dari orang. Kalau Bu Risma beda, siapa sih yang bisa mengendalikan beliau? Kalau A ya A kalau B ya B. Beda dengan pejabat lain yang bisa terbawa arus otomatis kan bisa dibohongi oleh bawahannya. Orangnya juga pekerja, hujan-hujan ya sudah malah bawa sapu lidi di pinggir jalan. Jadi Bu Risma itu banyak hal yang tidak bisa dimiliki oleh pemimpin lainnya. Otomatis ya nggak papa dengan pengusungan itu."*[73]

Perekrutan non kader PDI Perjuangan tidak semerta-merta semua yang mendaftar akan diterima. Hal itu bertujuan untuk menghindari permasalahan, sebab itu non kader melalui verifikasi. Seperti halnya cara pandang, sepak terjang kandidat tersebut sudah sejalan dengan PDI Perjuangan. Selain itu pihak internal tinggal memberikan semangat perjuangan secara ideologi. Demikian juga berlaku jika yang diusung merupakan kader PDI Perjuangan. Hal ini juga diutarakan oleh Djoko Prasektyo yaitu wakabid kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya:

> *"Tidak ada juga, karena mereka dari awal sudah mengetahui. Kalau kaitan dengan pilkada ada beberapa pertimbangan, salah satunya menyangkut peluang bisa memenangkan pilkada dan memeperoleh suara."*[74]

Erma Susanti juga mengatakan, selain elektabilitas dan yang lainnya. PDI Perjuangan juga mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya ialah, kemenangan yang diperoleh PDI

[73] Sukadar, *Wawancara,* Surabaya, 9 Juni 2017.
[74] Djoko Prasektyo, *Wawancara*, Surabaya 11 April 1017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjuangan. Kedua komitmen calon kandidat serta visi dan misi yang sejalan dengan garis perjuangan partai. Di sini lembaga survei memiliki peran yang sangat penting. Lembaga survei akan membidik nama-nama yang sudah ada di dapat dalam forum rakercabsus oleh DPP.

Pada pemilihan walikota tahun 2015 survei Risma yaitu non kader masih lebih tinggi tingkat kemenenangannya dari pada Wisnu sebagai kader internal PDI Perjuangan. Partai juga tidak mungkin memaksa kader sendiri kalau survei yang dimilikinya lemah. Bagaimanapun juga tujuan dari pemilihan umum iala kemenangan dengan mengibarkan sayap PDI Perjuangan.

> *"Iya itu tadi loh, pertama ya kemungkinan menang, dan kemungkinan menang di dapat dari lembaga survei. Lembaga survei yang terakreditasi yang direkom oleh DPP. Tidak mungkin kita main-main. DPP, DPD, DPC semua ada lembaga survei. Yang kedua ialah komitmennya terhadap partai, itu kita lihat saat wawancara. Ketiga, visi-misi yang sejalan. Selanjutnya pertimbangan bagaimana dukungan DPC terhadap calon ini. Misal ada yang maju kesolidan DPC pada kandidat ya diutamakan".*[75]

Motif PDI Perjuangan lebih memilih Risma karena hasil survei terhadap kemenangan untuk diusung oleh PDI Perjuangan. Di mana elektabilitas dan popularitas serta prestasi yang dimiliki Risma menjadi faktor untuk memperoleh kemenangan. Jadi perihal calon tersebut kader atau non kader bukan menjadi masalah karena tujuan yang terpenting ialah menang.

[75] Erma Susanti, *Wawancara,* Surabaya, 17 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *''Kalau di kita nggak masalah yang penting kan tujuannya menang. Yang menang kan diutamakan yang kader karena kan parpol fungsi utama menghasilkan kader. Jadi yang kader ditempatkan dieksekutif maupun legislatif. Sehingga kita pertama memang mengutamakan kader. Yang kedua karena kita partai terbuka, jadi siapapun yang mau gabung dengan kita dan dia mampu, secara survei elektabilitas tinggi itu juga dibuka. Yang menjadi pertimbangan kan tadi, yang pertama menang, yang kedua komitmen terhadap partai, yang ketiga perjuangannya segaris dengan partai. Jadi tidak masalah, biasanya kalau di survei dan hasilnya kader sendiri belum layak dijual, jadi diberi pilihan yang kedua sebagai wakil".*[76]

b. Kelanjutan Program Kerja PDI Perjuangan.

Program kerja yang sudah dibentuk oleh Risma-Wisnu pada periode 2010 juga menjadi salah satu motif yang menyebabkan PDI Perjuangan kembali mengusung Risma. Tatanan APBD yang diperbaiki meliputi infrastruktur maupun pendidikan. Kedua pasangan tersebut dipercaya dapat melanjutkan program kerja tersebut agar lebih baik. Usulan tersebut tidak hanya murni dari momen kepala daerah saja melainkan sinergi antara legislatif dan eksekutif APBD harus sejalan. PDI Perjuangan juga memaknai apabila pasangan Risma-Wisnu tidak dipasangkan pada saat itu, khawatir program kerja tidak berjalan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Mukharom:

> *".....Ini juga kan satu paket dengan Pak Wawali. Meneruskan program kerja dan menata APBD baik infrastruktur maupun pendidikan. Maka dari itu PDI Perjuangan merebut kekuasaan untuk menata pendidikan. Selanjutnya infrastruktur, Surabaya sudah 98% kampung terpaving. Itu juga dari APBD, itu juga bukan murni usulan kepala daerah tetapi sinergi antara legislative dan eksekutif terkait APBD harus klik. Kalau pada*

[76] Erma Susanti, *Wawancara,* Surabaya, 17 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *tahun itu kita tidak mengusung Risma-Wisnu khawatir diperjalanan nanti program tersebut tidak berjalan."*[77]

Tahun 2015 merupakan periode kedua kali kepemimpinan Risma yang direkrut PDI Perjuangan, itu artinya secara konstituen pada tahun 2019 Risma tidak bisa dicalonkan lagi. Sebagai alternatif PDI Perjuangan mempersiapkan Wisnu untuk berkompetisi. PDI Perjuangan memiliki strategi yang dimaknai sebagai peluang kemenangan di periode 2019. PDI Perjuangan benar-benar menjaga prinsip kepartaian tidak hanya pada saat momen demokrasi saja. Hal ini juga disampaikan oleh Mukharom:

> *"Kalau di tahun berikutnya Bu Risma kan sudah terkena aturan pemerintah karena sudah 2 kali. InsyaAllah ya wakilnya, tapi mengamankan secara konstituen kita harus benar-benar menjaga. Prinsip kita berbuat jangan hanya pas momen demokrasi saja. Sebelum euphoria berlangsung, setiap harinya kita menjalanka konstituen."*[78]

Mokharom juga menambahkan, strategi untuk tetap dipercaya oleh masyarakat Surabaya ialah PDI Perjuangan tidak boleh semena-mena dan harus melibatkan kepentingan rakyat. Peduli terhadap pendidikan bagi yang membutuhkan dengan memakai anggaran priadi atau anggota DPR juga. Infrastruktur jalan juga diperhatikan karena menyangkut kepentingan masyarakat. PDI Perjuangan tidak hanya membantu saat perayaan

[77]Mukharom, *Wawancara,* Surabaya, 15 Agustus 2017.

[78] Mukharom, *Wawancara,* Surabaya, 15 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demokrasi berlangsung saja. Sehingga hal tersebut diyakini bisa mengambil simpati dari masyarakat Surabaya.

> *"....PDI Perjuangan ini tidak boleh semena-mena karena harus melibatkan rakyat. Jadi tidakpas ada euphoria saja, sehingga rakyat mengetahui di mana letak PDI Perjuangan. Yang tidak bisa sekolah ya ayo disekolahkan memakai anggaran pribadi atau teman-teman di dinas maupun DPR. terutama eksekutif ya kita ambil untuk biaya pendidikan. Lalu infrastrktur, perbaikan jalan, disampaikan ke dinas untuk kepentingan masyarakat sehingga kita bisa dikatakan berbuat untuk masyarakat. Nah tidak hanya membantu pada saat euphoria berlangsung saja karena iu sudah menjadi petugas partai. Untuk periode mendatang InsyaAllah ya kurang lebih PDI Perjuangan kembali mendapat kursi yang jumlah banyak. Baik visi atau person kita tidak menarget waktu untuk membantu. Sehingga masyarakat sangat tersentuh sekali dengan kinerja kader PDI Perjuangan.*[79]

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 motif yang melatarbelakangi perekrutan Risma menjadi calon kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan dalam pemilihan walikota Surabaya tahun 2015. *Pertama* apabila dilihat dari kacamata fenomenologi *because of* motif ialah elektabilitas dan popularitas, calon kandidat yang sudah memiliki elektabilitas maka keberadaannya mudah diterima oleh masyarakat. Fenomena tersebut menjadi pertimbangan PDI Perjuangan untuk keberlangsungan partai ke depannya.

Kedua ialah prestasi, prestasi calon kanidat juga memiliki peluang kemenangan. Citra kandidat yang baik dapat memperoleh kemenangan pada proses pemilihan umum. Prestasi tersebut juga dimiliki oleh Risma

[79] Mukharom, *Wawancara,* Surabaya, 15 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tidak pernah terlibat dalam persoalan hukum. Demikian PDI Perjuangan tidak perlu berpikir dua kali untuk mengusung Risma.

Ketiga ialah problem rekrutmen partai politik, selain itu dengan adanya ketidakpercayaan diri partai juga menjadi motif PDI Perjuangan untuk mengusung Risma menjadi calon kepala daerah dalam pemilihan walikota Surabaya tahun 2015. Kader sendiri belum bisa dimajukan karena ada non kader yang siap diusung dan diyakini akan menjadi pemenang. Apalagi kenyataannya pada saat itu Risma merupakan calon *incumbent.*

Keempat ialah motif yang bisa dilihat dari kacamata fenomenologi yaitu *in order to* yaitu peluang kemenangan, peluang Risma untuk menjadi pemenang. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh DPP, Risma memiliki peluang yang lebih unggul dibandingkan oleh Wisnu. Meskipun non kader tapi DPP tetap merekomendasikan nama Risma sebagai calon kepala daerah, sedangkan Wisnu sebagai calon wakil kepala daerah. Setelah SK DPP tersebut turun maka Risma mendaftar ke DPC sekaligus mengurus KTA PDI Perjuangan. Selanjutnya oleh DPC pasangan Risma-Wisnu didaftarkan ke KPUD Kota Surabaya sebagai calon dan wakil kepala daerah Kota Surabaya yang diusung oleh PDI Perjuangan.

Kelima ialah dan kelanjutan program kerja PDI Perjuangan. Program kerja yang sudah dibentuk oleh Risma-Wisnu pada periode 2010 juga menjadi salah satu motif yang menyebabkan PDI Perjuangan kembali mengusung Risma. Tatanan APBD yang diperbaiki meliputi infrastruktur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun pendidikan. Kedua pasangan tersebut dipercaya dapat melanjutkan program kerja tersebut agar lebih baik. Usulan tersebut tidak hanya murni dari momen kepala daerah saja melainkan sinergi antara legislatif dan eksekutif APBD harus sejalan. PDI Perjuangan juga memaknai apabila pasangan Risma-Wisnu tidak dipasangkan pada saat itu, khawatir program kerja tidak berjalan.

Tahun 2015 merupakan periode kedua kali kepemimpinan Risma yang direkrut PDI Perjuangan, itu artinya secara konstituen pada tahun 2019 Risma tidak bisa dicalonkan lagi. Sebagai alternatif PDI Perjuangan mempersiapkan Wisnu untuk berkompetisi. PDI Perjuangan memiliki strategi yang dimaknai sebagai peluang kemenangan di periode 2019. PDI Perjuangan benar-benar menjaga prinsip kepartaian tidak hanya pada saat momen demokrasi saja.

Tabel 4.1

Konsep Fenomenologi motif *Because of* dan *In Order to* dalam Pemilihan Walikota Surabaya Tahun 2015.

Because of	***In Order to***
1. **Elektabilitas dan Popularitas.** Elektabilitas dan popularitas, calon kandidat yang sudah memiliki elektabilitas maka	1. **Peluang Kemenangan.** Peluang Risma untuk menjadi pemenang. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaannya mudah diterima oleh masyarakat. Fenomena tersebut menjadi pertimbangan PDI Perjuangan untuk keberlangsungan partai ke depannya. 2. **Prestasi.** Prestasi calon kanidat juga memiliki peluang kemenangan. Citra kandidat yang baik dapat memperoleh kemenangan pada proses pemilihan umum. Prestasi tersebut juga dimiliki oleh Risma karena tidak pernah terlibat dalam persoalan hukum. Demikian PDI Perjuangan tidak perlu berpikir dua kali untuk mengusung Risma. 3. **Problem Rekrutmen Partai Politik.** Adanya ketidakpercayaan diri partai terhadap kader sendiri belum bisa dimajukan karena	DPP, Risma memiliki peluang yang lebih unggul dibandingkan oleh Wisnu. 2. **Kelanjutan Program Kerja PDI Perjuangan.** Strategi yang dilakukanoleh PDI Perjuangan untuk tetap dipercaya oleh masyarakat Surabaya ialah PDI Perjuangan tidak boleh semena-mena dan harus melibatkan kepentingan rakyat. Peduli terhadap pendidikan bagi yang membutuhkan dengan memakai anggaran priadi atau anggota DPR juga. Infrastruktur jalan juga diperhatikan karena menyangkut kepentingan masyarakat. PDI Perjuangan tidak hanya membantu saat perayaan demokrasi berlangsung saja. Sehingga hal tersebut diyakini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada non kader yang siap diusung dan diyakini akan menjadi pemenang.	bisa mengambil simpati dari masyarakat Surabaya.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Proses pemilihan umun di Indonesia pada dasarnya memiliki satu tujuan yaitu kemenangan. Bahwa perolehan suara yang menang mendekati kekuasaan. Kemenangan dan kekuasaan juga menjadi tujuan PDI Perjuangan dalam mengikuti pemilihan umum. Hal ini juga berlaku di wilayah Surabaya pada waktu pemilihan Walikota tahun 2015.

Penentuan kandidat yang di usung PDI Perjuangan merupakan kandidat *Incumbent*, terlepas dari itu semua bahwa pemilihan Risma merupakan keputusan pusat. Hal ini DPP PDI Perjuangan memiliki hak otoritas tertinggi untuk memutuskan. Berdasarkan lembaga survei bahwa prosentase kemenangan Risma lebih unggul dari wisnu. Apalagi DPP juga menerima banyak saran untuk kembali mengusung Risma. Sentralisasi partai ini dialami oleh PDI Perjuangan di mana keputusan pusat memang menjadi hal yang harus dipatuhi.

PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan perihal kader atau non kader pada kandidat yang diusungnya. Sebab tujuan utama dari pemilihan umum tersebut adalah kemenangan. Risma yang merupakan PNS dipilih PDI Perjuangan karena elektabilitas dan popularitas yang dimilikinya. Selain itu proses pengkaderan yang PDI Perjuangan lakukan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendalam sehingga tidak percaya diri mengusung kadernya sendiri. Alasan tersebut diperkuat dengan penjelasan bahwa kader sendiri belum tentu bisa memperoleh suara kemenangan. Namun kandidat yang sudah dikenal masyarakat sudah pasti memiliki nilai kemenangan yang besar.

Proses rekrutmen seharusnya dilalui oleh partai politik, sebab rekrutmen merupakan salah satu fungsi dari penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan. Proses ini tidak dilalui oleh PDI Perjuangan dalam pengusungan Risma di tahun 2015. Padahal partai politik berperan merekrut pengikut-pengikut mereka, menominasikan kandidat-kandidat mereka. Tanpa rekrutmen partai politik tidak memiliki anggota atau tokoh yang dapat diandalkan dalam kegiatan politik.

Pada intinya rekrutmen politik sebagai sarana untuk memperoleh kader partai, namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak partai politik yang lupa akan fungsi rekrutmen karena terlalu memilih hal yang praktis. Salah satunya tidak perlu melakukan perekrutan tapi sudah memperoleh kandidat yang sangat layak untuk dimajukan dalam pemiliha umum. Tujuan partai politik tersebut ialah meraih kemenangandan kekuasaan.

Perpolitikan yang semakin dinamis juga membuat PDI Perjuangan perlu menyesuaikan diri. Di mana prosedur perekrutan tidak banyak diperhatikan. Hal yang menjadi pertimbangan adalah kemenangan dan kekuasaan yang diraih. Perekrutan oleh PDI Perjuangan pada pemilihan Walikota Surabaya tahun 2015 dikatakan tidak berjalan. Sebab munculnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nama Risma sebenarnya tidak terdapat di DPC. Sebelumnya nama yang mendaftar pada waktu itu hanya Wisnu. Nama Risma muncul setelah SK turun dari DPP PDI Perjuangan.

Apabila kader sendiri diperhatikan, dalam artian melalui proses rekrutmen yang sesungguhnya tentu partai politik lebih percaya diri dengan kandidat yang diusungnya. Problem seperti ini juga dialami oleh PDI Perjuangan karena lebih memilih hal yang praktis asal bisa meraih kemenangan.

Lemahnya sistem rekrutmen dan pola kaderisasi partai juga menjadi isu yang berkembang. Partai politik tidak perlu bersusah payah dalam mengembangkan sistem rekrutmen politik. Pada saat ini partai politik lebih menyediakan kesempatan kandidat non kader namun bisa meraih kemenangan dan kekuasaan. Partai politikhanya menjadi kendaraan untuk kandidat yang diusungnya.

Selain tidak berjalannya sistem perekrutan, PDI Perjuangan juga menerapkan desentralisasi. Di mana keputusan pusat dalam hal ini DPP PDI Perjuangan harus dipatuhi. Keputusan DPP menjadi keputusan yang menentukan siapa calon yang diusung. Mendaftar menjadi Walikota bisa melalui DPC, DPD, DPP. Meskipun rekomendasi dari DPP namanya tidak mendaftar di DPC tetap saja harus dipatuhi.

Ketua Umum dalam hal ini ialah Megawati menjadikan PDI Perjuangan menjadi partai modern. Hal tersebut dipersiapkan penguatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

basis pemilih, struktur partai, proses rekrutmen hingga kaderisasi. Proses kaderisasi dilakukan secara berjenjang yang bertujuan untuk menyiapkan kader yang baik.

Namun pada prakteknya PDI Perjuangan menunjukkan dirinya jika menjadi partai tradisional. Hal ini dibuktikan dengan kedudukan patronase yaitu ketua umum yang memiliki kekuasaan penuh. Pemilihan Walikota Surabaya tahun 2015 juga demikian, bahwa pengaruh keputusan pusat menentukan kandidat yang diusung.sekalipun kandidat tersebut belum mendaftar di DPC.

B. Dinamika Internal DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Pasca Perekrutan Risma oleh DPP PDI Perjuangan.

Dinamika merupakan peristiwa alamiah yang berkembang seiring dengan zaman yang dihadapi. Adanya dinamika di partai politik bisa menyebabkan munculnya faksi. Faksi selalu ada dan sering dijumpai dalam kehidupan komunitas atau kelompok.

Pada pemilihan walikota Surabaya tahun 2015, sebelum penetapan calon ada perbedaan antara seluruh PAC PDI Perjuangan yang ada di Surabaya dengan keputusan DPP. Di mana PAC menginginkan kader internal yaitu Wisnu Sakti Buana.

> *"Nah kebetulan Pak Wisnu kan ketua DPC, tentu PAC-PAC yang mendukung pengennya Pak Wisnu yang maju. Tapi ya kembali lagi kalau*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPP pertimbangan survei. Pertimbangan kemungkinan menang jadi melihat di situ, kita juga nggak mungkin maksa kader sendiri kalau surveinya lemah."[80]

Banyaknya dukungan dari PAC-PAC ini membuat pendukung Wisnu melakukan proses kampanye. Setiap PAC mendukung Wisnu karena menyadari adanya proses kaderisasi dan organisasi yang menjadi latar belakang keputusan DPP.

"PAC-PAC yang mendukung whisnu sakti tetap menjalankan keputusan rekomendasi dengan baik. termasuk diantaranya proses kampanye. setiap PAC pendukung whisnu sakti itu juga menyadari adanya proses kaderisasi dan organisasi yang menjadi latar belakang keputusan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan tersebut."[81]

Pihak DPC bukannya tidak mau mengusung Risma untuk maju sebagai calon walikota Surabaya. Tetapi pihak tersebut hanya menunggu Risma yang berKTA PDI Perjuangan. Hal tersebut juga diutarakan oleh Djoko Prasektyo yaitu wakabid kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya:

"Iya, tetapi bukan tidak mengusung, melainkan menunggu, menunggu Risma, dan selama menunggu PDI Perjuangan harus memperkenalkan calon kepada masyarakat kalau semisal bukan Risma bukan sebagai calon maka kita harus memperkenalkan calon yang kita usung supaya masyarakat tau. Waktu juga terbatas."[82]

Adanya faksi merupakan wujud hasil dari sebuah perbedaan pandangan kepentingan atau strategi yang tidak terjembatani antara anggota partai. Apalagi pada tahun 2015 PDI Perjuangan dari DPP bahwa kader yang diusung harus sesuai dengan keputusan pusat.

---

[80] Erma Susanti, *Wawancara,* Surabaya, 17 Juli 2017.
[81] Aven Januar, *Wawancar*a, Surabaya 21 Juli 2017.

[82] Djoko prasektyo, *Wawancara*, Surabaya 11 April 1017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjelang penetapan calon walikota yang diusung PDI Perjuangan, bahwa nama yang muncul dari internal pada saat itu ialah Wisnu Sakti Buana. PDI Perjuangan tidak akan kembali mengusung Risma. Karena selama ini PDI Perjuangan dianggap lupa dengan partai pengusungnya. Sehingga PDI Perjuangan mempromosikan Wisnu sebagai calon yang diusung. Padahal pada saat itu Risma belum mempunyai KTA PDI Perjuangan.

PDI Perjuangan juga memiliki pertimbangan dalam mempromosikan Wisnu. Mengingat waktu juga semakin mendekati dengan penutupan, maka alternatif sementara mempromosikan Wisnu. Sebelum Risma memiliki KTA, terdapat opini yang bermunculan di internal PDI Perjuangan. Opini tersebut mempertimbangkan bahwa non kader boleh diusung apabila memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi pemenang. Selanjutnya dari kader internal bisa diposisikan sebagai wakilnya. Namun karena keputusan oleh DPP harus dari kader sendiri maka menunggu Risma memperoleh KTA.

> *"Jadi ada beberapa tahap, mulai penjaringan, rekrut ada 5 calon misal, lalu saat di provinsi tinggal 3 calon, lalu diserahkan pusat tinggal 1 calon yang terpilih. Hasil dari pusat yang memunculkan nama tersebut sudah turun. Ya sudah pertikaian ya langsung ditutup karena SK tadi. Selanjutnya kita yang tinggal memenangkan dan mengamankan SK tersebut. Siapapun yang dimenangkan ya kita tinggal tawadhu'."*[83]

Mekanisme penjaringan calon kepala daerah sudah diatur dalam keputusan kongres. Perbedaan seperti itu memiliki pro dan kontra yang memang membuat dinamika berjalan. Apalagi konstitusi PDI Perjuangan

[83] Sukadar, *Wawancara,* Surabaya, 9 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut jelas bahwa perwakilan dan lembaga resmi yang ikut dalam pemilihan umum membutuhkan partai. Hal tersebut juga diutarakan oleh Erma Susanti.

> *"Itu pasti ada. Artinya gini, konstitusi kita kan jelas bahwa kita kan perwakilan kemudian lembaga resmi yang ikut dalam pemilu butuh partai. Mungkin pada waktu itu pendukung Risma ingin independen, tapi setelah dipertimbangkan lagi akhirnya mau di PDI Perjuangan. Bahwa independen susah, kalau pun lewat partai lain belum tentu juga menang."*[84]

Erma Susanti juga menjelaskan bahwa pencalonan Risma pada saat itu tidaklah mencederai PDI Perjuangan. Risma tetap mendaftar setelah proses bertemu ketua umum serta jajaran PDI Perjuangan yang ada di pusat.

> *"Pada saat itu Bu Risma tetap mendaftar. Kesannya diminta, tapi beliau tetap mendaftar. Hanya prosesnya setelah bertemu ketua umum dan jajaran PDI Perjuangan pusat untuk memastikan. Mungkin juga pertimbangan partai bahwa Bu Risma harus direkrut. Kalau di kami sih pilkada tidak semerta harus kader sendiri. Selama non kader ya tidak masalah selama bisa menang dan tidak mencederai partai pengusung."*[85]

Beberapa media juga diberitakan bahwa PDI Perjuangan tengah berkonflik dengan Risma. Hal ini juga dikatakan oleh Djoko Prasektyo yaitu wakabid kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya:

> *"Seperti musuh ya? Istilahnya kalau bicara media harus selektif, tergantung media dan yang dibahas, kalau tidak seideologi dengan PDI Perjuangan pasti pemberitaannya mendiskriminasi PDI Perjuangan. Media sekarang beda dengan dulu, media sekarang membawa kepentingan. Tapi sebetulnya karena itu tadi alasannya bahwa Risma belum berKTA, sedangkan instruksi pusat harus berKTA. Usai Risma menunjukkan KTA ya sudah situasi mulai kondusif."*[86]

---

[84] Erma Susanti, *Wawancara,* Surabaya, 17 Juli 2017.
[85] Erma Susanti, *Wawancara,* Surabaya, 17 Juli 2017.
[86] Djoko prasektyo, *Wawancara*, Surabaya 11 April 1017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan dari pusat tersebut yang mengatakan bahwa Risma akan diusung oleh PDI Perjuangan. Namun nama Risma tidak muncul sebagai pendaftar di DPC dan DPD. Akan tetapi di PDI Perjuangan bisa mendaftar melalui beberapa pintu yaitu DPC, DPD dan DPP. Pada tahun 2015 tersebut Risma muncul di DPP, sebab pada saat itu DPP mendengar usulan rakyat yang menginginkkan Risma untu maju.

> *"Di PDI Perjuangan orang bisa mendaftar sendiri, bisa didaftarkan oleh orang lain ada yang mengusulkan dari PAC untuk penjaringan. Itu keputusan diambil dari forum rakercabsus (rapat kerja cabang khusus) untuk pemilihan walikota. Itu disampaikan di DPD, dan DPP. Nah di PDI Perjuangan orang hisa mendaftar di DPC, DPD, DPP jadi ada tiga pintu. Di DPD pun Bu Risma tidak mendaftar. Tapi oleh DPP saat itu mendengar masukan masyarakat untuk mengusung Risma. Karena Bu Risma dianggap sosok potensial dalam memimpin Surabaya. Meskipun proses normalnya melalui tahap tersebut, DPP mengusung Risma apa mau menjadi walikota. Ya sempat memanas di bawah itu, tapi ya tidak berani."*[87]

Permasalah yang di hadapi pada saat itu ialah adanya pihak yang kontra karena beranggapan bahwa proses penetapan Bu Risma tidak memenuhi prosedur. Akan tetapi di balik itu semua Risma sudah mendapat rekomendasi dari pusat untuk menjadi calon walikota.

> *"Di antaranya karena Bu Risma tidak melalui prosedur awal. Wong tidak ikut apa-apa kok namanya tiba-tiba muncul. Tapi ya bisik-bisik saja sih, kira-kira begitu yang terjadi. Jadi sebenarnya Bu Risma itu tidak pernah mencalonkan, misal mengambil formulir itu pun tidak pernah."*[88]

PDI Perjuangan sudah biasa dengan perbedaan yang terjadi di setiap fenomena politik. Konflik memang memungkinkan terjadi namun pada saat pemilihan walikota 2015 tersebut bisa diatasi oleh pihak internal.

---

[87] SW Nugroho, *Wawancara,* Surabaya 19 Juli 2017.
[88] SW Nugroho, *Wawancara,* Surabaya 19 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di tambah lagi hasil survei yang memilih Risma dan Wisnu kurang lebih 93-95%.

> *"konflik itu bagian dari dinamika internal partai. Tapi sekali lagi berdasarkan survei juga di 2015, kader pdi perjuangan yang memilih Risma Wisnu juga mencapai kisaran 93-95%. Sehingga proses dinamika internal dapat diselesaikan dengan baik oleh internal partai sendiri."*[89]

Selain itu PDI Perjuangan memiliki manajemen konflik melalui musyawarah. Proses musyawarah tersebut melalui tahap di antaranya sosialisasi keputusan mediasi antar calon sebelum dikeluarkan. Selanjutnya internalisasi keputusan rekom dengan menjalankannya bersama-sama.

> *"Manajemen pengelolaan konflik di PDI Perjuangan melalui musyawarah mufakat. proses musyawarah mufakat tersebut melalui beberapa tahapan diantaranya sosialisasi keputusan, mediasi antar calon yang mengemuka sebelum rekomendasi dikeluarkan (hal ini selalu dilakukan oleh DPP) dan yang terakhir adalah internalisasi keputusan rekom dengan menjalankan keputusan tersebut secara bersama sama."*[90]

Nugroho mempercayai adanya dinamika di partai. Bahkan keberadaan dinamika tersebut bisa membuat pertengkaran di internal sendiri. Namun kembali lagi dengan keputusan pusat yang harus dipatuhi.

> *"Iya ada, itukan namanya dinamika. Dalam politik dinamika itu pasti ada karena itu ruang untuk menyatukan perbedaan. Kalau mau berantem ya monggo, tapi kalau ada rapat ya monggo ayo dirubah menjadi pemahaman yang sama."*[91]

Jadi perihal perbedaan pendapat tersebut wajar saja dihadapi oleh PDI Perjuangan. Karena hal itu merupakan dinamika yang memang harus

---

[89] Aven Januar, *Wawancar*a, Surabaya 21 Juli 2017.
[90] Aven Januar, *Wawancar*a, Surabaya 21 Juli 2017.

[91] SW Nugroho, *Wawancara,* Surabaya 19 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihadapi dan diselesaikan. Penyelesaian dinamika tersebut juga bisa di atasi manakala SK DPP itu sudah turun sehingga jajaran PDI Perjuangan di bawahnya harus tunduk dan patuh.

> *"Setelah Risma mendaftar ya sudah, tidak ada lagi perbedaan karena tujuan kita menang dan kita harus berjuang bersama. Kita sudah terbiasa dengan apapun keputusan partai. Sebelum ada SK ya fine saja mau berantem dengan tatanan etis karena memang harus bersaing."*[92]

Nugroho juga mengatakan bahwa dinamika bisa memang bisa terjadi disetiap saat. Namun apabila SK sudah turun dari pusat, maka dinamika tersebut akan hilang dengan sendirinya.

> *"Tidak perlu direda, dibiarkan, jadi dinamika dalam internal dibiarkan. Berproses seperti biasa tetap berjalan. Ketika SK turun otomatis reda. Dijamin."*[93]

Setelah rekomendasi dikeluarkan PDI Perjuangan jarang terjadi faksi dalam setiap keputusan karena PDI Perjuangan sebagai partai yang menjunjun tinggi proses demokrasi dan musyawarah mufakat. Termasuk keputusan pada saat itu mendukung penuh pasangan yang diusung. Hal itu sesuai dengan pernyataan Aven Januar:

> *"Dalam setiap proses rekomendasi, tidak pernah terjadi konflik pasca rekom dikeluarkan. karena setiap pengurus DPC, PAC maupun Ranting telah memahami proses rekomendasi telah diatur dalam AD /ART yang ditetapkan melalui kongres 2010. Sebagai partai yang menjunjung tinggi proses demokrasi khususnya musyawarah mufakat jarang terjadi faksi dalam setiap keputusan apapun termasuk diantaranya rekomendasi DPP terkait pilkada kota Surabaya 2010 lalu. hal ini dibuktikan oleh survey proximity pada pilkada 2010 lalu yang menyatakan bahwa dukungan riil kader PDI Perjuangan kepada pasangan Tri Rismaharini - Bambang DH sebesar 93,7%."*[94]

---

[92] SW Nugroho, *Wawancara,* Surabaya 19 Juli 2017.
[93] SW Nugroho, *Wawancara,* Surabaya 19 Juli 2017.
[94] Aven Januar, *Wawancar*a, Surabaya 21 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah keputusan dari pusat turun yaitu SK DPP menetapkan Risma sebagai kandidat calon walikota dan didampingi Wisnu. Namun PDI Perjuangan beranggapan bahwa Risma mendaftar H- beberapa jam penutupan. Risma lebih sering diminta oleh partai daripada daftar sendiri, dan hal itu bertepatan saat Risma memperoleh KTA dan dinyatakan sebagai kader PDI Perjuangan.

Menyikapi perbedaan sebelumnya, di mana PAC harus menerima keputusan pusat dan melupakan berbagai macam perbedaan sebelumnya. Karena tujuan utama pilwai 2015 adalah kemenangan.

Dari internal PDI Perjuangan sendiri memang memiliki cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Di mana akan berlaku sanksi, peringata, pembebasan dan pelepasan dari jabatan bahkan bisa saja dikeluarkan dari keanggotaan partai.

> *"Ada sanksi, sanksi kan peringatan, pembebasan, dan pelepasan dari jabatan bahkan dikeluarkan dari keanggotaan. Tapi selama ini tidak ada yang sampai tahap dikeluarkan."*[95]

Akan tetapi pada tahun 2015 tidak ada yang sampai pada tahap perbedaan yang sangat serius. Tidak ada yang dibebastugaskan dari jabatan di PDI Perjuangan. Namun dari luar internal pasti ada pihak yang memang kontra dengan kebijakan tersebut.

> *"Ada, tapi itu dari luar internal dengan cara membuat status provokasi di meddia sosial. Tapi kalau pengurus internal ya tidak ada, karena itu tadi ya harus tunduk dengan pusat."*[96]

[95] SW Nugroho, *Wawancara,* Surabaya 19 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PDI Perjuangan memang memaknai adanya faksi disetiap kehidupan partai politik. Pada dasarnya faksi itu memang bersifat dinamis artinya berkembang sesuai dengan fenomena yang terjadi pada saat itu. Namun faksi tersebut kemudian bisa hilang kalau SK DPP sudah turun.

> *"Ada, namun faksi itu menjadi hilang kalau SK DPP atau rekom sudah turun. Iya, tapi sebenarnya faksi sampai kapanpun itu pasti ada. Misal sekarang Bu Risma dan Pak Wisnu sudah jadi, kan ada orang yang mengakses Bu Risma gampang atau susah. Jadi faksi itu ada dalam tingkatan laten, bukan bentuk benih-benih."*[97]

Pada pencalonan Risma tidak menutup kemungkinan jika PDI Perjuangan juga berhadapan dengan faksi-faksi. Hal itu disebabkan dengan perbedaan pendapat di salah satu anggota. Namun kembali lagi PDI Perjuangan juga mampu menyelesaikan faksi tersebut.

> *"Faksi memang ada. Jangankan partai, namanya faksi sudah pasti ada, di kampus saja ada. Di perusahaan saja ada. Ya seperti itu lah, di partai juga pasti ada. Kebetulan pada waktu Bu Risma tidak ada faksi. Tidak. Tidak ada faksi waktu itu, karena Bu Risma bukan dari hasil penjaringan. Tetapi langsung ditunjuk. Dan itu bisa melalui lembaga survei, semua partai juga memakai lembaga survei. Seumpama si A kalau diusung apa menang, begitu juga si B C D. Jadi ada beberapa nama yang dibidik."*[98]

> *"Ada AD/ART partai sebagi ruh dan garis perjuangan. Ada aturan partai dari nomer satu hingga sekian. Jadi sebagai pijakan kita untuk menetralisir perbedaan, persoalan, entah itu faksi-faksi yang ada semua itu mengacu pada AD/ART partai."*[99]

Terlepas faksi yang terjadi, bahwa faksi tersebut didak disebabkan oleh internal PDI Perjuangan. Sebab diinternal memang semua harus

---

[96] SW Nugroho, *Wawancara,* Surabaya 19 Juli 2017.
[97] SW Nugroho, *Wawancara,* Surabaya 19 Juli 2017.
[98] Sukadar, *Wawancara,* Surabaya, 9 Juni 2017.
[99] Sukadar, *Wawancara,* Surabaya, 9 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunduk pada keputusan pusat. Dan jajaran di bawahnya harus tunduk dengan semua keputusan tersebut.

> *"Kalau internal ya tidak ada, biasanya itu ya orang luar PDI Perjuangan. Nikmatnya berpartai itu memiliki banyak perbedaan. Apalagi PDI Perjuangan itu heterogen, ada Islam, Kristen, kalau PKI ya tidak ada."*[100]

Faksi memang terbentuk karena situasi yang sesuai dengan kondisi politik pada saat itu. Bersifat dinamis dan sangat memiliki kemungkinan untuk terjadi berulang. Bahkan terlepas dari sebelum dan setelah penetapan Risma.

> *"Jadi, yang namanya faksi itu kan sesungguhnya terbentuk sesuai dengan situasi politik saat itu. Kalau dulu lawan bisa saja jadi kawan dan sebaliknya. Itu bersifat sangat dinamis mungkin juga sifatnya itu berulang. Tidak bisa diduga ya karena berubahnya kan setiap saat."*[101]

Akan tetapi pada tahun 2015 faksi yang muncul untuk mencederai partai bisa diatasi manakala SK DPP sudah turun dari pusat. Karena memang pada dasarnya PDI Perjuangan itu tegak lurus. Dalam artian segala keputusan pusat harus dipatuhi.

> *"Kalau 2015 itu hampir tidak ada, tidak muncul karena terlalu kuat. Sama saja membenturkan kepala ke tembok itu."*[102]

PDI Perjuangan dikenal sebagai partai modern, namun pada kenyataannya PDI Perjuangan ialah partai tradisional. Hal itu terbukti dari bagaimana anggota partai sangat tunduk terhadap ketua umum. Anggota di bawahnya tidak bisa mengubah keputusan dari pusat. Bahkan penyelesaian dinamika harus dipatuhi jika selembar SK sudah turun dari pusat. Jika SK

---

[100] SW Nugroho, *Wawancara,* Surabaya 19 Juli 2017.
[101] SW Nugroho, *Wawancara,* Surabaya 19 Juli 2017.
[102] SW Nugroho, *Wawancara,* Surabaya 19 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sudah turun maka lingkup bawah harus mematuhinya termasuk menyelesaikan konflik yang ada.

> *"Meskipun ada dinamika namun setelah turun SK ya kembali lagi tunduk sama SK dari DPP. Memang dinamika harus dilalui kan?"*[103]

Perihal argumentasi kelompok yang berbeda, PDI Perjuangan juga menyerahkan pada saat SK Turun.

> *"Ya kembali lagi, mereka menghormati. Kita tetap bicara demokrasi. Mungkin Sidoarjo menginginkan yang lain, Mojokerto ingin yang lain, Jombang, Banyuwangi bahkan Surabaya juga ingin yang lain. Ketika SK turun ya tetap netral dan kembali mematuhi SK tersebut. Ya kembali lagi dengan AD/ART PDI Perjuangan. Itu sebagai ruh, dan ketika SK turun ya sudah dinamika atau masalah semacamnya sudah selesai."*[104]

Internal PDI Perjuangan setelah perekrutan Risma juga tidak mengalami gejolak perpolitikan. Apapun keputusan pusat harus dipatuhi oleh seluruh jajaran di bawahnya. Hal ini juga dijelaskan oleh Erma Susanti:

> *"Setelah Risma mendaftar ya sudah, tidak ada lagi perbedaan karena tujuan kita menang dan kita harus berjuang bersama. Kita sudah terbiasa dengan apapun keputusan partai. Sebelum ada SK ya fine saja mau berantem dengan tatanan etis karena memang harus bersaing."*[105]

Meredanya dinamika yang terjadi antara anggota PDI Perjuangan tentu tidak lepas dari keputusan yang ditentukan oleh pusat. DPC PDI Perjuangan Surabaya memang sebagai pintu pertama dalam merekrut calon yang akan diusulkan ke pusat. Pada saat itu hanya nama Wisnu yang mendaftar di kantor DPC. Bahkan dari masing-masing PAC di Kota Surabaya juga menginginkan Wisnu.

---

[103] Sukadar, *Wawancara,* Surabaya, 9 Juni 2017.
[104] Sukadar, *Wawancara,* Surabaya, 9 Juni 2017.
[105] Erma Susanti, *Wawancara,* Surabaya, 17 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hingga tahapan saat mencapai DPD PDI Perjuangan Jawa Timur hanya ada nama Wisnu yang saat itu mendaftar. Sehingga proses penjaringan yang dilakukan DPC dan DPD PDI PDI Perjuangan hanya memunculkan nama Wisnu. Sedangkan di pusat dalam hal ini ialah DPP PDI Perjuangan merekrut nama Risma berdasarkan hasil survei yang lebih unggul dari padaWisnu. Selain itu juga berdasarkan aspirasi dari masyarakat khusunya di Kota Surabaya.

Pendaftaran sebagai calon walikota atau wakil walikota oleh PDI Perjuangan tidak hanya dilakukan dipintu DPC PDI Perjuangan saja, melainkan bisa melalui DPD dan DPP. Sedangkan keputusan mutlak berada di DPP dan harus dipatuhi oleh jajaran di bawahnya. Karena garis perjuangan menyakini bahwa keputusan pusat ialah keputusan terbaik untuk PDI Perjuangan ke depannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mukharom:

> *"Kalau PDI Perjuangan itu harus tawadhu' pada pimpinan, karenayang diputuskan itu sudah pasti yang terbaik. Maka dari itu kita harus mengikuti aturan itu sebagai tongkat ekstafet."*[106]

[106] Mukharom, *Wawancara,* Surabaya, 15 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id